

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini karena pembangunan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga proses kelancaran pembangunan ekonomi disebabkan karena pertumbuhan ekonomi. Salah satu isu global yang fokus dikaji oleh seluruh pihak organisasi non-pemerintah dan organisasi pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu organisasi yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi secara global adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berdasarkan program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, penjelasan ini menekankan terhadap tiga hal yaitu, proses, jangka panjang dan output per kapita. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari masa ke masa yang dinamis, output perkapita menjelaskan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, dan jangka panjang menggambarkan kecenderungan terjadinya perubahan perekonomian dalam jangka panjang akibat terciptanya proses internal perekonomian (*self generating*).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kenaikan pendapatan nasional secara berkesinambungan pada pendapatan perkapita pada suatu periode perhitungan tertentu. Peningkatan jumlah produksi dan output dapat

menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi, indikator ini berdasarkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah. Saat ini dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menaikkan output secara berkesinambungan berdasarkan ketersediaan barang-barang modal, teknologi serta sumberdaya manusia. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah yang kini dikenal desentralisasi.

Otonomi daerah yang diberlakukan membuat kepala daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan daerahnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terjadinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Perekonomian negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah barang jasa riil lebih besar terhadap menggunakan faktor produksi tiap tahunnya.

Menghadapi kemajuan zaman, pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi bergerak pada kebijakan fiskal produksi barang dan jasa di suatu negara dengan meningkatkan jumlah produksi barang industri, melakukan perkembangan infrastruktur, dan peningkatan jumlah sekolah. Dengan adanya penambahan produksi sektor jasa dan peningkatan produksi modal. Sehingga pendapatan nasional sering digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perspektif islam pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan volume barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan aspek akhlak, keadilan dan adanya keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat agar tercapainya tujuan suatu negara untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat QS. Al-Qashash 28:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa manusia haruslah menjaga kekayaan dan karunia yang telah Allah berikan di jalan yang benar dan amalan untuk kehidupan di akhirat. Manusia hendaknya senantiasa berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan dalam nikmat karuninya. Dan sebagai seorang khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak melakukan kerusakan pada muka bumi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai komponen yang digunakan untuk mengukur prestasi dari adanya perkembangan suatu ekonomi, dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan fiskal produksi barang dan jasa. terdapat beberapa cara dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, baik melihat dari sisi penawaran ataupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran (*supply*) dengan menghitung nilai tambah setiap sektor dalam produk nasional. Sedangkan pada sisi permintaan (*demand*) dengan menghitung komponen-komponen makro ekonomi seperti pengeluaran masyarakat untuk konsumsi.

Negara memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini karena pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sebagai negara berkembang, Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda mengakibatkan proses dalam pertumbuhan ekonomi yang di harapkan masing-masing provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut.

Melihat pertumbuhan ekonomi dapat dengan melihat tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan pada perekonomian negara tersebut. Tingkat ekonomi yang mengalami pertumbuhan adalah pada sistem sosial yang mengalami kenaikan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Tabel 1.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia Pada Tahun
2022

| Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|----|---------------------|-------|
| No | Provinsi | 2022 | No | Provinsi | 2022 |
| 1 | Papua Barat | 2.01 | 18 | Maluku | 5.11 |
| 2 | Sulawesi Barat | 2.30 | 19 | Kalimantan Selatan | 5.11 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 3.05 | 20 | Jambi | 5.13 |
| 4 | Gorontalo | 4.04 | 21 | DI Yogyakarta | 5.15 |
| 5 | Aceh | 4.21 | 22 | Sulawesi Tengah | 15.17 |
| 6 | Lampung | 4.28 | 23 | Sumatera Selatan | 5.23 |
| 7 | Bengkulu | 4.31 | 24 | DKI Jakarta | 5.25 |
| 8 | Sumatera Barat | 4.36 | 25 | Jawa Tengah | 5.31 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 4.40 | 26 | Jawa Timur | 5.34 |
| 10 | Kalimantan Timur | 4.48 | 27 | Kalimantan Utara | 5.34 |
| 11 | Riau | 4.55 | 28 | Sulawesi Utara | 5.42 |
| 12 | Sumatera Utara | 4.73 | 29 | Jawa Barat | 5.45 |
| 13 | Bali | 4.84 | 30 | Sulawesi Tenggara | 5.53 |
| 14 | Banten | 5.03 | 31 | Kalimantan Tengah | 6.45 |
| 15 | Kalimantan Barat | 5.07 | 32 | Nusa Tenggara Barat | 6.95 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 5.09 | 33 | Papua | 8.97 |
| 17 | Kep. Riau | 5.09 | 34 | Maluku Utara | 22.94 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata, terdapat provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi yang sedang dan bahkan terdapat provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah Nusa Tenggara Timur, provinsi ini menduduki posisi ketiga sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi

yang rendah di Indonesia. Dengan besar laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 adalah sebesar 3.05 persen. Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah provinsi Papua Barat, Sulawesi Barat. Karena provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka dapat dilihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada lima tahun terakhir.

Tabel 1.2
Laju Petumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2018-2022

| Laju Pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Timur | | | | | |
|--|------|------|-------|------|------|
| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 5.11 | 5.25 | -0.84 | 2.52 | 3.05 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022)

Tabel di 1.2 menunjukkan bahwa di provinsi Nusa Tenggara Timur laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif atau tidak stabil, dan mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sebesar 5.11 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5.25 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan besar laju pertumbuhan ekonomi -0.84 persen, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka sebesar 2.52 persen. Dan pada tahun 2021 angka laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sebesar 3.05 persen.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk masyarakat karena dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi riil, baik secara perkapita maupun

absolut, karena dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh berbagai sektor hingga saat ini terus mengalami perkembangan dan menunjukkan angka perbaikan. Sektor yang dimiliki agregasi aktivitas ekonomi terbesar adalah sektor pertanian, sektor pariwisata, industri dan jasa.

Menurut Sandra Dewi (2017) upah minimum berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat, hal ini mendorong keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, hingga kebutuhan tersier dengan berdasarkan jumlah upah yang diterima masyarakat yang bekerja. Upah minimum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dimana dengan adanya kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja atau buruh untuk meningkatkan pertumbuhan produksi dan penghasilan.

Pemerintah menetapkan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi upah ditetapkan maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan hal ini berdampak terhadap pendapatan suatu daerah atau negara. Penetapan upah minimum sebagai sarana agar upah yang diterima masyarakat tidak mengalami penurunan terutama untuk pekerja tingkat bawah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, dan salah satunya adalah tingkat pengangguran. Angka pengangguran sering kali dijadikan tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara atau daerah terkait apakah perekonomiannya dalam

kondisi stabil, mengalami pertumbuhan atau justru mengalami kemunduran. Pengangguran terjadi akibat tingginya tingkat perubahan terhadap angkatan kerja yang tidak diikuti oleh adanya lapangan pekerjaan yang cukup, serta kecilnya persentase penyerapan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya permasalahan pengangguran ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pengangguran ataupun setengah pengangguran merupakan pemborosan sumber daya dan potensi serta menjadi beban bagi masyarakat, menyebabkan kemiskinan dan menimbulkan banyaknya kerusuhan sosial dan kriminal. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran itu sangat kuat, di mana adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi angka pengangguran.

Menurut teori Robert Solow, pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang berasal dari manusia, penggunaan teknologi, adanya akumulasi modal dari hasil output. Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif maupun negatif, oleh karena itu adanya penambahan penduduk dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya positif. Peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk dari masa ke masa mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk dapat memperbesar jumlah tenaga kerja, sehingga dengan adanya penambahan tersebut mengakibatkan suatu daerah mampu meningkatkan produksi guna memenuhi pasar domestik yang meningkat. Selain itu, terdapat akibat buruk

dari adanya peningkatan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh faktor produksi yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak dapat mempengaruhi peningkatan produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran pemerintah juga, pentingnya otonomi daerah untuk dapat memberdayakan potensi daerah masing-masing. Dengan diberikannya kebebasan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan keuangan daerah serta membuat kebijakan yang akan berpengaruh pada kemajuan daerah guna menunjang kemajuan daerah, pemerintah daerah juga memiliki hal dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dengan kegunaan memenuhi kebutuhan prasarana umum atau kebutuhan publik.

Berlangsungnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tentu berkaitan dengan sumber alokasi dana guna menjalankan proses pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran negara berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi secara langsung atas pengeluaran langsung pemerintah dan secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kenaikan konsumsi, investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Namun, apabila pengeluaran pemerintah tidak terkendali, hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran, inflasi dan menyebabkan hutang negara yang melonjak. Tujuan dari pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam proyek-proyek yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, membuat pemerataan pendapatan, peningkatan

kesejahteraan dan program yang dapat bersinggungan langsung dengan daerah terbelakang.

Fenomena di atas menjadi dalam penelitian ini untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk media pengetahuan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini di harapkan mampu menjadi masukan pemerintah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam membentuk kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi media pembelajaran dan referensi penelitian selanjutnya yang akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah pengetahuan penulis terkait masalah perekonomian khususnya pada pertumbuhan ekonomi, dan sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan.